Muhamad Subkhan | Agustinus Ghunu | Yayuk Hidayah
Saryono | Kevy Listiana Fransisca Taneo

DEMOKRASI LOKAL INDONESIA

KEARIFAN ADAT, MUSYAWARAH DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

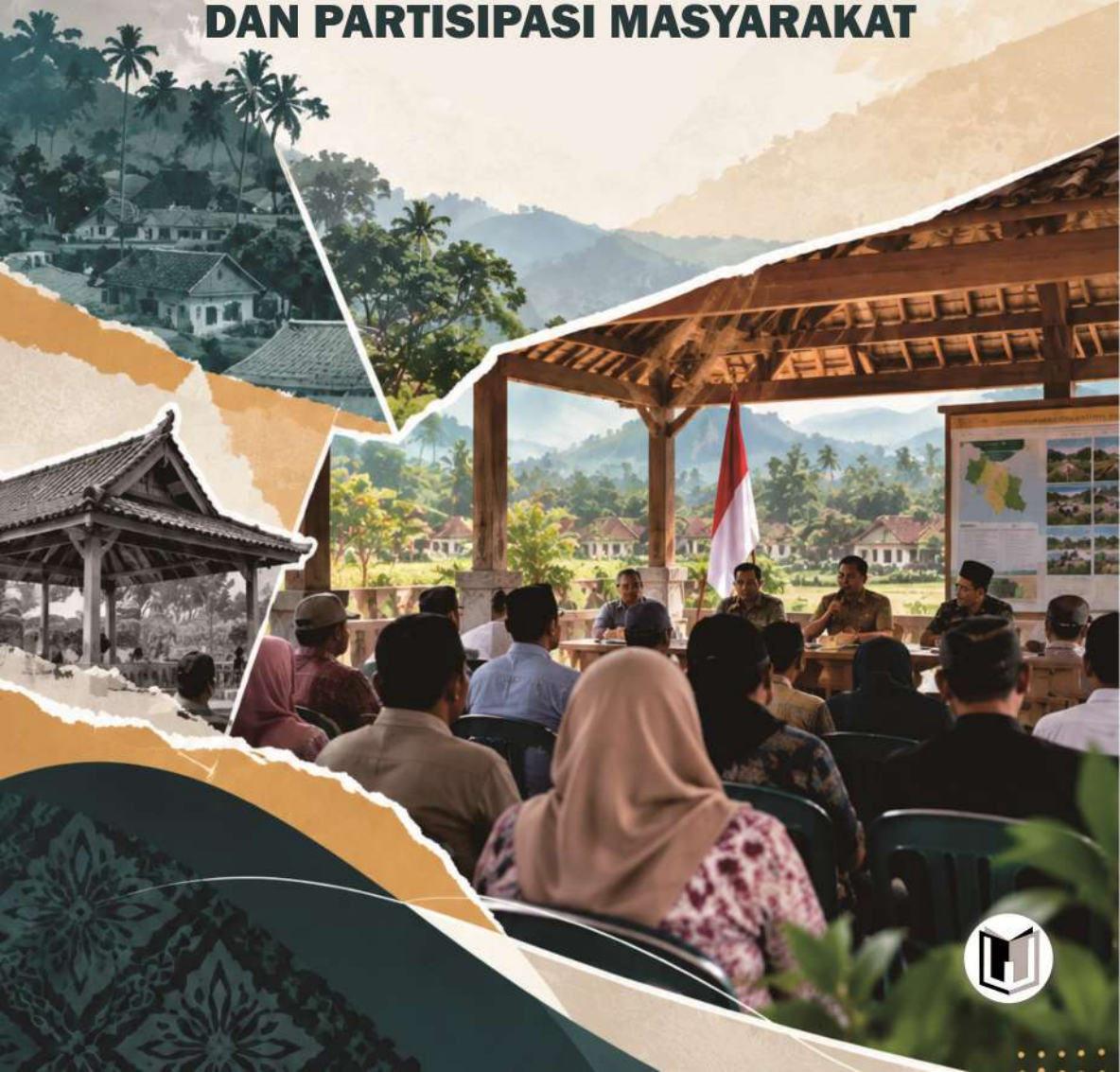

DEMOKRASI LOKAL INDONESIA

KEARIFAN ADAT, MUSYAWARAH DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Muhamad Subkhan | Agustinus Ghunu | Yayuk Hidayah
Saryono | Kevy Listiana Fransisca Taneo

Penerbit widina

DEMOKRASI LOKAL INDONESIA:
KEARIFAN ADAT, MUSYAWARAH DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Tim Penulis:
Muhamad Subkhan, Agustinus Ghunu, Yayuk Hidayah,
Saryono, Kevy Listiana Fransisca Taneo

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-537-7

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Demokrasi Lokal Indonesia: Kearifan Adat, Musyawarah Desa, dan Partisipasi Masyarakat" dapat disusun sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah pengetahuan mengenai demokrasi, kearifan lokal, dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Demokrasi merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun, demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, keberadaan lembaga perwakilan, dan mekanisme pemerintahan formal. Demokrasi juga tumbuh dan berkembang melalui praktik sosial budaya masyarakat, seperti musyawarah adat, rembug warga, gotong royong, serta berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan tradisi, demokrasi lokal menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara nilai-nilai budaya, aspirasi masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai demokrasi lokal Indonesia dengan menempatkan kearifan adat, musyawarah desa, dan partisipasi masyarakat sebagai tiga aspek utama yang saling berkaitan. Kearifan adat dipahami sebagai sumber nilai dan norma sosial yang membentuk identitas, solidaritas, serta pola hubungan dalam masyarakat. Musyawarah desa merupakan ruang deliberasi yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, merumuskan kebutuhan bersama, dan menentukan prioritas pembangunan. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan administratif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan harapan warga.

Pembahasan dalam buku ini juga diarahkan untuk menunjukkan bahwa demokrasi lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Nilai-nilai musyawarah, gotong royong, toleransi, solidaritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial merupakan bagian dari pengalaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang dapat mendukung kehidupan demokratis. Melalui aktualisasi nilai-nilai tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan keputusan, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta mengevaluasi hasil pembangunan. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, pengembangan demokrasi lokal perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual. Kearifan adat tidak selalu secara otomatis mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif. Dalam kondisi tertentu, struktur sosial dan relasi kekuasaan dapat membatasi keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi lokal perlu disertai komitmen terhadap kesetaraan warga negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang terwakili. Pelestarian tradisi hendaknya berjalan seiring dengan upaya memperluas partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa setiap warga memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan publik.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, pemerhati demokrasi, aparatur pemerintahan, pengelola pemerintahan desa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain menjadi sumber referensi akademik, buku ini diharapkan dapat mendorong pembaca untuk merefleksikan praktik demokrasi di lingkungan masing-masing dan mengembangkan partisipasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa pembahasan mengenai demokrasi lokal Indonesia memiliki cakupan yang luas dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan bagi pengembangan karya ini pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku "Demokrasi Lokal Indonesia: Kearifan Adat, Musyawarah Desa, dan Partisipasi Masyarakat" dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan demokrasi, penguatan partisipasi warga, serta pembangunan kehidupan demokratis yang berakar pada kearifan lokal dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Semoga buku ini juga menjadi inspirasi bagi tumbuhnya masyarakat yang kritis, inklusif, toleran, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I NILAI-NILAI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL **1**
A. Pengertian Demokrasi 2
B. Demokrasi Pancasila 4
C. Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 6
D. Praktik Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 12
E. Tantangan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 19
F. Nilai-Nilai Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 21
G. Model Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal (Perspektif Agustinus Ghunu) 23
H. Model Indeks dan Evaluasi Demokrasi Pancasila 26
BAB II PRAKTIK DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT ADAT **35**
A. Musyawarah Adat Sebagai Mekanisme Demokrasi 37
B. Penguatan Perspektif Pemikiran Islam 41
C. Penguatan Perspektif Pemikiran Indonesia 42
D. Peran Lembaga Adat 45
E. Peran Tokoh Adat 47
F. Penyelesaian Konflik Berbasis Nilai Lokal 51
G. Sanksi Adat dan Kontrol Sosial 55
H. Studi Kasus Praktik Demokrasi Dalam Masyarakat Adat di Indonesia 56
BAB III DEMOKRASI LOKAL DALAM PEMERINTAHAN DESA **61**
A. Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat 63
B. Musyawarah Desa Sebagai Wadah Demokrasi 68
C. Peran BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 72
D. Transparansi dan Akuntabilitas Desa 73
BAB IV DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN SOSIAL **77**
A. Demokrasi Dalam Keluarga dan Komunitas 79
B. Peran Tradisi Lokal Dalam Pengambilan Keputusan 83

C. Kepemimpinan Lokal Yang Demokratis 87
D. Etika Sosial dan Kesadaran Kolektif 93
BAB V DEMOKRASI, MULTIKULTURALISME, DAN PLURALISME 103
A. Keberagaman dan Kesadaran Kebangsaan 104
B. Demokrasi dan Toleransi Antarbudaya 105
C. Kearifan Lokal Sebagai Perekat Sosial 108
D. Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Budaya 111
GLOSARIUM 119
DAFTAR PUSTAKA 125
PROFIL PENULIS 133

BAB I

NILAI-NILAI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Demokrasi merupakan sistem politik yang terus berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia memiliki karakter khas yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga kultural. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik yang mengatur proses pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila dan keanekaragaman budaya yang berkembang di berbagai daerah. Setiap masyarakat memiliki tradisi, norma, adat istiadat, serta pengalaman sosial yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, gotong royong, toleransi, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis sekaligus memperkuat praktik demokrasi yang berakar pada identitas dan karakter bangsa Indonesia.

Kearifan lokal sebagai warisan pengetahuan dan pengalaman kolektif masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk budaya demokrasi yang partisipatif dan berkeadaban. Melalui praktik musyawarah, rembug warga, kerja sama komunitas, dan penyelesaian konflik secara damai, masyarakat belajar menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan aspirasi, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan

BAB II

PRAKTIK DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT ADAT

Demokrasi dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar budaya lokal yang telah berkembang jauh sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan. Salah satu bentuk nyata praktik demokrasi tersebut adalah dalam kehidupan masyarakat adat yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, kebersamaan, dan keseimbangan sosial. Secara filosofis, hal ini dapat ditelusuri dalam tradisi komunitarianisme, yang menempatkan komunitas sebagai basis utama pembentukan nilai dan keputusan bersama. Menurut Alasdair MacIntyre, identitas dan rasionalitas individu tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan komunitas tempat ia hidup (MacIntyre, 1984: 222). Dalam konteks masyarakat adat, keputusan melalui musyawarah tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga bermakna moral karena berakar pada nilai-nilai kolektif yang diwariskan secara turun-temurun.

Berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan mekanisme voting dan agregasi suara mayoritas, demokrasi dalam masyarakat adat lebih bersifat komunal, deliberatif, dan berbasis nilai budaya. Kritik terhadap demokrasi liberal ini juga dikemukakan oleh Michael Sandel yang menilai bahwa liberalisme cenderung mengabaikan dimensi moral dan kebersamaan dalam kehidupan politik (Sandel, 1996: 5). Dengan demikian, demokrasi adat dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap reduksi demokrasi menjadi sekadar prosedur formal.

BAB III

DEMOKRASI LOKAL DALAM PEMERINTAHAN DESA

Demokrasi Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari pergulatan panjang antara nilai-nilai universal modern dengan kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, gagasan demokrasi telah lama dirumuskan oleh para pemikir klasik seperti Rousseau yang menekankan kedaulatan rakyat melalui konsep *general will* serta Montesquieu yang menggarisbawahi pentingnya pembagian kekuasaan sebagai jaminan kebebasan politik (Montesquieu, 1748/1989; Rousseau, 1762/2012). Tocqueville menunjukkan bahwa praktik demokrasi sangat ditentukan oleh kondisi sosial dan budaya masyarakatnya (Tocqueville, 1856/2001). Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut mengalami proses kontekstualisasi melalui nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan yang kemudian membentuk karakter demokrasi Pancasila. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hal ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berakar pada budaya bangsa.

Desa sebagai unit sosial-politik memiliki posisi strategis dalam praktik demokrasi tersebut, terutama setelah lahirnya kebijakan otonomi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam kerangka ini, otonomi desa menjadi instrumen penting

BAB IV

DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Demokrasi dalam konteks kehidupan sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem politik formal yang diatur melalui konstitusi dan institusi negara, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam interaksi sehari-hari masyarakat. Dalam realitas Indonesia yang memiliki keragaman budaya, tradisi, dan struktur sosial yang kompleks, demokrasi tidak hadir dalam bentuk yang tunggal, tetapi beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi tidak hanya diadopsi, tetapi juga diinterpretasikan dan dipraktikkan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Kearifan lokal dalam hal ini tidak sekadar dipahami sebagai warisan budaya yang bersifat simbolik, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki fungsi sosial yang nyata dalam mengatur kehidupan bersama. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, serta penghormatan terhadap norma sosial telah lama menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan terjadinya partisipasi, penyelesaian konflik, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam konteks ini, demokrasi berbasis kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang

BAB V

DEMOKRASI, MULTIKULTURALISME, DAN PLURALISME

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman sosial dan budaya yang sangat tinggi di dunia, mencakup suku, bahasa, agama, serta sistem nilai dan tradisi yang beragam. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai masyarakat multikultural, di mana berbagai kelompok budaya hidup berdampingan dalam satu sistem berbangsa dan bernegara. Menurut Koentjaraningrat (2009), budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dipelajari, yang berfungsi sebagai perekat sosial dalam mengelola keberagaman.

Dalam konteks tersebut, demokrasi menjadi sistem politik relevan yang memberikan ruang partisipasi dan menjamin hak setiap warga negara, tidak hanya melalui mekanisme formal seperti pemilu, tetapi juga pengelolaan keberagaman sehari-hari. Koentjaraningrat (1987) menekankan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mengakar dalam kebudayaan lokal Indonesia, seperti musyawarah dan gotong royong, yang tercermin dalam sistem organisasi kemasyarakatan dan pranata sosial. Sementara itu, dalam masyarakat multikultural Indonesia, demokrasi harus berbudaya dan mengakar pada realitas keberagaman, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang demokrasi Indonesia yang menekankan pemberian hak-hak komunitas budaya.

PROFIL PENULIS



Agustinus Ghunu, S.E., M.MA., M.AP (Cert. TESOL) adalah dosen tetap pada Progam Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Manajemen di Universitas Widya Karya Malang, kemudian melanjutkan studi Magister Ekonomi Pertanian dan Magister Administrasi Publik di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang, dan berhasil menjadi salah satu lulusan terbaik. Sebelum berkarier di dunia akademik, penulis memiliki pengalaman di sektor swasta, pendidikan luar sekolah, serta mengajar di tingkat sekolah dasar. Pengalaman internasional juga diperoleh melalui kegiatan pendidikan di Filipina dan Malaysia.

Dalam bidang akademik, penulis aktif menulis karya ilmiah berupa buku dan artikel jurnal, yang berawal dari ketertarikannya pada penulisan karya sastra seperti puisi. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik sebagai peserta, narasumber, maupun penyelenggara seminar nasional dan internasional, serta terlibat dalam kegiatan kuliah tamu dan pengembangan akademik lainnya. Saat ini, penulis menjabat sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan UNITRI Malang, serta aktif dalam berbagai organisasi, baik di tingkat daerah maupun perguruan tinggi, termasuk sebagai anggota ADPK. Penulis juga mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dosen Pancasila Angkatan V yang diselenggarakan oleh BPIP RI di Semarang pada tahun 2026. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi berbasis kearifan lokal sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Motto: *"Senjata utama untuk mengubah dunia adalah pendidikan."*

Salam Pancasila dan Salam Kebhinnekaan!

Email: agusgh2014@gmail.com



Muhamad Subkhan, Dosen Tetap dan Kaprodi di STKIP Arrahmaniyah Depok Program Studi S1 PPkn. Lahir di Grobogan, 19 Mei 1972, merupakan anak Ke-9 dari 9 bersaudara, dari Pasangan Bapak Sayuti (Alm) dan Ibu Siti Sari (Alm). Riwayat Pendidikan di Perguruan Tinggi: S1 Program Studi PPKn di STKIP Arrahmaniyah Depok (Tahun 2011), S2 Program Studi PPKn di STKIP Arrahmaniyah Depok (Tahun 2017). Dan S3 Program Studi PPKn Program S3 Pendidikan Kewarganegaraan di UPI Bandung. (Tahun 2025). Aktifitas lain yakni aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendiri dan Ketua Paguyuban dan Koperasi Warga Purwodadi Grobogan di Bogor. Pendiri dan Ketua Koperasi Syariah Bahagia Sejahtera, Ketua IMANIAR (Ikatan Alumni Magister Arrahmaniyah). Aktif pada Organisasi Profesi seperti ADPK, AP3KNI. Aktif menulis buku/ jurnal pada setiap semester, Juga aktif dalam beberapa Seminar Nasional, Serta Reviewer Jurnal Ilmiah. Email: muhamadsubkhan212@gmail.com



Yayuk Hidayah adalah akademisi di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan keilmuan sekaligus praksis kewarganegaraan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta. Fokus kajiannya pada *civic engagement*, dengan penekanan pada relasi dinamis antara warga negara, nilai-nilai lokal, dan praktik demokrasi yang kontekstual.

Dalam ranah pendidikan dan pengajaran, Yayuk Hidayah mengembangkan pendekatan pembelajaran transformatif yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter kewarganegaraan yang kritis, reflektif, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis serta kesadaran demokratis yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Di bidang penelitian, ia secara konsisten mengkaji isu-isu strategis seperti demokrasi lokal, otonomi desa, pendidikan kewarganegaraan, dan *civic engagement*. Karya-karyanya telah dipublikasikan pada berbagai forum

ilmiah nasional dan internasional, serta berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik mengenai kewarganegaraan yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Dalam pengabdian kepada masyarakat, Yayuk Hidayah aktif menginisiasi dan mengembangkan program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan literasi kewarganegaraan dan partisipasi publik. Pendekatan yang diusung berbasis nilai-nilai lokal dan prinsip demokrasi deliberatif, sehingga mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara bermakna.



Dr. Saryono, S.Pd., M.Pd. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara Jakarta. Lahir di Lampung Timur pada 3 April 1986. Ia merupakan dosen tetap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Kusuma Negara Jakarta sejak 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara Jakarta (2015), Magister (S2) di STKIP Arrahmaniyah Depok (2019), dan Doktor (S3) Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta (2026). Sebelum berkarier sebagai dosen, ia memiliki pengalaman profesional dalam bidang pendidikan, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk sebagai salah satu perintis dan pendiri SD Islam Nisrina (2015). Aktif dalam organisasi profesi AP3KnI DKI Jakarta dan Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Nasional, serta produktif menulis buku dan artikel ilmiah, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, etika politik, pendidikan karakter, dan antikorupsi. Ia juga terlibat dalam hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta meraih penghargaan **Best Presenter pada Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (2025). Dapat dihubungi melalui email: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id



Kevy Listiana Fransisca Taneo merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Ia memiliki fokus keahlian di bidang Hukum dan juga Ketertarikan dalam Mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dengan perhatian khusus pada penguatan nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta penghargaan terhadap kebinekaan bangsa.

Sebagai seorang akademisi, Kevy aktif mengembangkan inovasi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berkarakter, serta mampu berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga harmoni sosial. Selain menjalankan tugas pengajaran, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme.

Komitmen Kevy tidak hanya tercermin dalam aktivitas akademik di ruang kuliah, tetapi juga dalam kontribusinya menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat. Secara khusus, ia berperan dalam memperkuat budaya toleransi, kebersamaan, dan semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

DEMOKRASI LOKAL INDONESIA

KEARIFAN ADAT, MUSYAWARAH DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Buku ini membahas dinamika demokrasi di tingkat lokal sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi lokal tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi, kearifan adat menjadi salah satu landasan penting dalam membangun praktik demokrasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daerah.

Buku ini menguraikan berbagai aspek demokrasi lokal, mulai dari konsep dan perkembangan demokrasi di Indonesia, hubungan antara pemerintahan daerah dan masyarakat, hingga peran lembaga adat dalam menjaga kehidupan sosial dan politik. Pembahasan mengenai musyawarah desa menjadi perhatian utama karena mencerminkan tradisi pengambilan keputusan melalui dialog, kesepakatan bersama, dan semangat gotong royong. Selain itu, buku ini mengangkat pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengawasan pemerintahan, penyelesaian konflik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Pendidikan & Metodologi Penelitian

ISBN 978-634-317-537-7

9 786343 175377